ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Umi Tri Ramadhanni
Email: umitriramadhani39@gmail.com
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl.Jend. Ahmad Yani No.KM .6, Bukit Harapan, Kec.Soreang, Kota Parepare,Sulawesi Selatan Kode Pos 91112

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan fokus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan derajat desentralisasi fiskal. Sumber pembiayaan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mencakup dana perimbangan dan PAD. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah selama periode 2017–2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam empat tahun terakhir belum mampu dioptimalkan secara maksimal. Penerimaan PAD masih sangat rendah dibandingkan dengan potensi yang dimiliki daerah, seperti dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Hal ini mencerminkan rendahnya kinerja dalam penggalian sumber pendapatan asli. Selain itu, berdasarkan analisis rasio desentralisasi fiskal, diketahui bahwa PAD hanya memberikan kontribusi sebesar 10,57% terhadap total pendapatan daerah. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Sidenreng Rappang masih sangat rendah dan ketergantungannya terhadap dana transfer dari pemerintah pusat cukup tinggi. Ketergantungan ini berimplikasi pada terbatasnya ruang fiskal daerah dalam menentukan arah pembangunan secara mandiri.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Desentralisasi Fiskal, Kinerja Keuangan, Pemerintah Daerah

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of the Regional Government of Sidenreng Rappang Regency with a focus on Regional Original Revenue (PAD) and the degree of fiscal decentralization. Sources of regional financing as stipulated in Law Number 33 of 2004 concerning Financial Balance between Central and Regional Governments include balancing funds and PAD. This study uses a quantitative descriptive method to assess the effectiveness and efficiency of regional financial management during the 2017-2020 period. The results showed that the PAD of Sidenreng Rappang Regency in the last four years has not been able to be optimized optimally. PAD revenue is still very low compared to the potential owned by the region, such as from the regional tax sector, regional levies, and the results of regional property management. This reflects the low performance in extracting original revenue sources. In addition, based on the analysis of the fiscal decentralization ratio, it is known that PAD only contributes 10.57% to total regional income. This value indicates that the level of financial independence of Sidenreng Rappang Regency is still very low and its dependence on transfer funds from the central government is quite high. This dependence has implications for the limited regional fiscal space in determining the direction of development independently.

Keywords: Local Own Revenue, Fiscal Decentralization, Financial Performance, Local Government

PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia mulai diterapkan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan revisi dari

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang ini memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, sesuai dengan prinsip desentralisasi, demokrasi, dan tugas pembantuan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan menciptakan sistem keuangan yang adil, proporsional, dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut mampu menjalankan roda pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Kemampuan tersebut tercermin dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang menjadi indikator utama kinerja pengelolaan keuangan daerah. APBD merupakan alat untuk mengukur seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat.

Penilaian kinerja keuangan tidak hanya dilakukan terhadap organisasi yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga penting diterapkan pada lembaga pemerintah, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap publik. Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah (1). Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa dana publik yang digunakan memberikan hasil maksimal bagi masyarakat.

Menurut Mardiasmo, kinerja anggaran adalah instrumen penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menilai kinerja kepala daerah dan unit kerja di bawahnya (2). Pengukuran kinerja bertujuan bukan hanya menunjukkan bahwa anggaran telah dibelanjakan, tetapi juga menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan efektif (3).

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi sumber daya alam besar, khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah masih belum menunjukkan stabilitas kinerja. Hal ini dapat dilihat dari fluktuasi tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih rendah akibat penurunan PAD. Kondisi ini menyebabkan semakin tingginya ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Analisis kinerja keuangan daerah menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangannya secara mandiri. Dengan menganalisis indikator seperti rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan, dan rasio ketergantungan, dapat diketahui posisi keuangan daerah secara objektif dari waktu ke waktu (4).

Penelitian yang berjudul *"Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah"* menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian, semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri tanpa tergantung pada pemerintah pusat (5).

Selanjutnya, penelitian dengan judul *"Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Aceh Besar"* menemukan bahwa penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan APBD. Hasil studi ini mengindikasikan bahwa fluktuasi PAD dapat mempengaruhi ketersediaan anggaran untuk pembiayaan program-program daerah secara optimal (6).

Sementara itu, penelitian yang berjudul *"Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Keuangan Daerah: Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa"* menyimpulkan bahwa fluktuasi desentralisasi fiskal mencerminkan belum stabilnya sistem keuangan daerah. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, sehingga ketergantungan pada dana transfer pusat masih tinggi (7).

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, agar dapat diketahui sejauh mana daerah mampu mengelola keuangannya secara mandiri, efektif, dan efisien dalam pelaksanaan otonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan tujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah berdasarkan sejumlah indikator keuangan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis kinerja keuangan daerah berdasarkan data keuangan yang diperoleh secara kuantitatif. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi
   Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati kondisi aktual dan proses pengelolaan keuangan daerah. Observasi dilakukan dengan cara sistematis dan terencana untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai fenomena yang terjadi di lapangan.
2. Dokumentasi
   Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Dokumen ini menjadi sumber utama dalam perhitungan rasio-rasio keuangan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif atau menggunakan rasio. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalaah sebagai berikut:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fikal
   Menurut Mahmudi, menyatakan bahwa Derajat Desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Perhitungan rasio derajat desentralisasi fikal dapat dilihat sebagai berikut:

$$Rasio\ Derajat\ Desentralisasi = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daera}{Pendapatan\ Daerah} x100$$

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
   Rasio Kemandirian digunakan untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Adapun rumus untuk mengukur kinerja keuangan berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan adalah sebagai berikut:

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah\ (PAD)}{Pendapatan\ Transfer} x100\%$$

3. Ketergantungan Keuangan Daerah (KKD)
   Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapat transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (8):

$$KKD = \frac{Pendapatan\ Transfer}{Total\ Pendapatan\ Daerah} x100\%$$

4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
   Efektivitas adalah pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas digunakan untuk mengukur upaya pungut PAD (*tax effort*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan, salah satunya bisa diukur dengan efektivitas pelaksanaan anggaran utamanya dalam mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (8):

$$Rasio\ Efektivitas\ PAD \frac{Realisasi\ PAD}{Anggaran\ PAD} x100$$

5. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah adalah rasio yang menggambarkan dan menunjukkan tingkat perbandingan antara besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan yang telah diterima. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$REKD \frac{Realisasi\ Belanja\ Daerah}{Realisasi\ Penerimaan\ PAD} x100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2020

Menurut Gege Edy Prasetya dalam bukunya yang berjudul Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan: "Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

Mengukur kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan analisis rasio, maka salah satu alat ukur yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan perhitungan yakni Laporan Realisasi APBD setiap tahunnya. Gambaran tentang Realisasi Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2017-2020

URAIAN	2017		2018	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN	1.695.529.974.000,00	1.304.893.387.615,43	1.602.336.633.000,00	1.192.104.230.255,23
PENDAPATAN ASLI DAERAH	163.408.876.000,00	146.032.092.013,43	167.491.056.000,00	115.904.953.769,23
DANA PERIMBANGAN	1.038.591.661.000,00	996.482.766.059,00	917.199.465.000,00	910.640.882.073,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	493.529.437.000,00	162.378.529.543,00	517.646.112.000,00	165.558.394.413,00
BELANJA	1.697.821.350.000,00	1.298.748.117.451,00	1.610.656.954.000,00	1.185.592.943.580,73
BELANJA TIDAK LANGSUNG	651.495.624.000,00	550.341.798.660,00	692.083.684.000,00	571.961.321.187,00
BELANJA LANGSUNG	1.046.325.726.000,00	748.406.318.791,00	918.573.270.000,00	613.631.622.393,73
SURPLUS/(DEFISIT)	(2.291.376.000,00)	6.145.270.164,43	(8.320.321.000,00)	6.511.286.674,50
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.045.376.868,00	8.330.138.027,35	10.599.321.000,00	10.599.321.693,78

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.754.000.868,00	3.876.086.498,00	2.279.000.000,00	2.274.086.498,00
PEMBIAYAAN NETTO	2.291.376.000,00	4.454.051.529,35	8.320.321.000,00	8.325.235.195,78
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	10.599.321.693,78	0,00	14.836.521.870,28

URAIAN	2019		2020	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN	1.291.764.761.000,00	1.235.859.131.692,56	1.225.093.920.000,00	1.186.736.488.855,58
PAD	143.444.241.000,00	125.734.083.925,72	144.063.516.000,00	132.951.314.765,71
DANA PERIMBANGAN	963.649.904.000,00	938.071.387.429,00	830.615.777.000,00	824.743.457.536,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	184.670.616.000,00	172.053.660.337,84	250.414.627.000,00	229.041.716.553,87
BELANJA	1.301.538.282.000,00	1.223.443.105.181,86	1.244.791.686.000,00	1.184.112.543.536,2
BELANJA TIDAK LANGSUNG	636.228.298.000,00	613.474.468.242,00	685.177.043.000,00	670.216.828.125,15
BELANJA LANGSUNG	665.309.984.000,00	609.968.636.939,86	559.614.643.000,00	513.895.715.411,77
SURPLUS/(DEFISIT)	(9.773.521.000,00)	12.416.026.510,70	(19.697.766.000,00)	2.623.945.318,66
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	14.836.521.870,28	14.836.521.870,28	24.051.766.375,98	24.642.738.152,98
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.063.000.870,28	3.193.086.498,00	4.354.000.375,98	4.074.086.498,00
PEMBIAYAAN NETTO	9.773.521.000,00	11.643.435.372,28	19.697.766.000,00	20.568.651.654,98
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	24.059.461.882,98	-	23.192.596.973,64

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran BKAD Kab, Sidenreng Rappang (diolah)

Hasil analisis pada Tabel 1 memberikan penggambaran tentang jumlah anggaran dan realisasi yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rentang waktu 2017-2020.

2. Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fikal (DDF)

Rasio derajat desentralisasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Derajat desentralisasi} = \frac{pendapatan\ Asli\ Daerah}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100.$$

Perhitungan untuk Derajat Desentralisasi Fikal secara menyeluruh yakni Tahun 2017-2020, dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Derajat Desentralisasi Fikal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2020

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	TPD (Rp)	DDF(%)	Kemampuan Keuangan
2017	146.032.092.013,43	1.304.893.387.615,43	11,19	Kurang
2018	115.904.953.769.23	1.192.419.015.591,23	9,72	Sangat kurang
2019	125.734.083.925,72	1.235.859.131.692,56	10,17	Kurang
2020	132.951.314.765,71	1.186.736.488.855,58	11,20	Kurang

Sumber Data : BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Tahun 2017-2020 pencapaian tertinggi terhadap rasio Derajat Desentralisasi ini terjadi pada Tahun 2020 yakni sebesar 11,20%. Sementara persentase terendah terjadi pada Tahun 2018 yakni sebesar 9,72%

Standar untuk mengukur Tingkat Desentralisasi Fikal Daerah menunjukkan berada pada interval 10,00%-20,00% dikategorikan “Kurang”. Kurang yang dimaksud dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah masih kurang dalam kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat Partisipasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Pendapatan yang diperoleh Kabupaten Sidenreng Rappang setiap tahunnya perlu untuk lebih ditingkatkan.

b. Rasio Kemandirian Daerah (KD)

Rasio Kemandirian Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RKD = \frac{pendapatan\ Asli\ Daerah}{Pendapatan\ Transfer} \times 100$$

Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Daerah secara menyeluruh mulai Tahun 207-2020 dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Total Pendapatan Transfer (Rp)	RKD (%)	Kriteria
2017	146.032.092.013,43	996.482.766.059,00	14,65	Instruktif
2018	115.904.953.769,23	910.640.882.073,00	12,72	Instruktif
2019	125.734.083.925,72	938.071.387.429,00	13,40	Instruktif
2020	132.951.314.765,71	824.743.457.536,00	16,12	Instruktif

Sumber data : BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang (diolah)

Keterangan :

1. Instruktif adalah ketika peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara maksimal).
2. Konsultatif adalah campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah
3. Partisipatif adalah peranan pemerintah pusat sudah berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan dianggap telah mampu melaksanakan urusan otonomi
4. Delegatif adalah campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.4 diatas kemampuan keuangan Kabupaten Sidenreng Rappang tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

Tingginya peran dari pemerintah pusat terhadap keuangan daerah hal tersebut didasarkan bahwa peran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat rendah terhadap jumlah transfer yang diperoleh daerah.

c. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (KKD)

Ketergantungan Keuangan daerah menurut Halim (2013) dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Pendapatan transfer yang dimaksud pada perhitungan ini adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan yakni

$$KKD = \frac{Transfer}{Total\ Pendapatan} \times 100$$

Perhitungan untuk Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah untuk Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4 Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2020

Tahun Anggaran	Transfer (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	KKD (%)	Kriteria
2017	996.482.766.059,00	1.304.893.387.615,43	76,36	Sangat Tinggi
2018	910.640.882.073,00	1.192.104.230.255,23	76,38	Sangat Tinggi
2019	938.071.387.429,00	1.235.859.131.692,56	75,90	Sangat Tinggi
2020	824.743.457.536,00	1.186.736.488.855,58	69,49	Sangat Tinggi

Sumber data : BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang (diolah)

Hasil perhitungan Tingkat Ketergantungan Daerah sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat ketergantungan daerah dari Tahun 2017-2020 yakni sebesar 74,54%. Sesuai kriteria yang dijadikan pedoman dalam mengukur Tingkat Ketergantungan Daerah mengisyaratkan bahwa daerah dengan presentase di atas 50% maka dapat dikategorikan tingkat ketergantungan pemerintah daerah masih sangat tinggi, dimana untuk Kabupaten Sidenreng Rappang tingkat ketergantungan terhadap keuangan pusat mencapai 74,54% Total Pendapatan Daerah.

d. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio Efektivitas PAD ini dihitung dengan membandingkan antara Realisasi PAD dengan target penerimaan PAD, dengan rumus sebagai berikut:

$$Rasio\ Efektivitas\ PAD \frac{Realisasi\ PAD}{Anggaran\ PAD} \times 100$$

Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2017-2020 dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2020

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektivitas	Keterangan
2017	146.032.092.013,43	163.408.876.000,00	89,36	Cukup Efektif
2018	115.904.953.769,23	167.491.056.000,00	69,20	Kurang Efektif
2019	125.734.083.925,72	143.444.241.000,00	87,65	Cukup Efektif
2020	132.951.314.766,71	144.063.516.000,00	92,28	Efektif

Sumber Data : BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5. diatas menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari rasio efektivitas yaitu Tingkat Pencapaian dari Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan cukup efektif, hal ini didasari bahwa pencapaian terhadap Target yang telah ditetapkan belum mampu tercapai secara keseluruhan atau 100%.

e. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah (REKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$REKD = \frac{Realisasi\ Belanja\ Daerah}{Realisasi\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	REKD (%)	Kriteria
2017	1.298.748.117.451,00	1.304.893.387.615,43	99,52	Kurang Efisien
2018	1.185.592.943.580,73	1.192.104.230.255,23	99,45	Kurang Efisien
2019	1.223.443.105.181,86	1.235.859.131.692,56	98,99	Kurang Efisien
2020	1.184.112.543.536,92	1.186.736.488.855,58	99,77	Kurang Efisien

Sumber data : BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 6 diatas Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2017-2020 dikategorikan kurang efisien dengan rata-rata rasio sebesar 99,77% yang mana berada di skala interval 90%-100%. Hal ini disebabkan karena realisasi belanja lebih besar dari pada realisasi pendapatannya sehingga dikategorikan kurang efisien, yang berarti total belanjanya melebihi total pendapatan daerah karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya

Pembahasan

1. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi (DDF)

Derajat Desentralisasi Fikal sesuai dengan pengertiannya adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Hasil analisis yang diperoleh setelah melakukan perhitungan untuk Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sejak 2017-2020 memberikan gambaran bahwa tingkat kemampuan pemerintah daerah dapat dirata-ratakan berada di kriteria kurangnya derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, karena berada dalam skala interval 10,01 – 20,00.

Hal ini terjadi karena PAD di Kabupaten Sidenreng Rappang masih relatif kecil bila dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi setempat. Adapun pembangunan yang dibantu oleh pemerintah pusat salah satunya yaitu Wisata Kincir Angin PLTB danyang berada di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan adanya pembangunan ini pemerintah berharap bisa menjadi peluang baru untuk menciptakan sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Kondisi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara umum dapat dikategorikan baik, indikator ini dapat dilihat dari pencapaian realisasi dari Pendapatan Asli Daerah terhadap target yang diberikan walaupun secara rata-rata baru mencapai 82,55% akan tetapi setiap tahunnya menunjukkan pertumbuhan yang baik hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah penerimaan dari Tahun 2017-2020 mengalami kenaikan 2,90%.

Maka dalam hal ini meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dikatakan kurang dalam derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selalu berusaha untuk mengoptimalkan pembangunan pada sektor-sektor yang dianggap mampu mendorong peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pada sektor pariwisata dan informasi komunikasi, dimana kedua peran ini sangat besar dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan kesimpulan pada penelitian yang dilakukan oleh Heri Fikal Harahap (2020) walaupun rasio derajat desentralisasi masih tergolong rendah, ketergantungan Pemerintah Pusat/Provinsi masih sangat tinggi serta penerimaan PAD tidak mencapai target yang dianggarkan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukkan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar dapat melakukan update data pengusaha-pengusaha yang menjadi wajib pajak daerah dengan cara melakukan kerjasama dengan intansi terkait seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Dinas Perdagangan, dan sebagainya. Sehingga penghitungan potensi PAD sesuai dengan jumlah potensi sesungguhnya.

2. Tingkat Ketergantungan dan Kemandirian Daerah

Mengukur tingkat Ketergantungan dan Kemandirian Daerah pada dasarnya juga berfokus pada kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi perolehan PAD sebuah daerah maka Tingkat Kemandirian akan semakin baik dan Tingkat Ketergantungan akan semakin menurun.

Jadi Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang secara keseluruhan dapat dikatakan rendah, yang dimana berarti tingkat kemampuan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih relatif rendah artinya peran Pemerintah Pusat masih sangat dominan dari pada Kemandirian Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan kurangnya realisasi PAD seperti Pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Serta kurangnya pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan penerimaan daerah terutama penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dan diharapkan agar berupaya menggali lagi potensi-potensi sumber pendapatan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Untuk mengatasi Tingkat Ketergantungan tersebut dengan cara Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang harus melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparatur daerah.

Hasil ini sejalan dengan Penelitian Desi Susilawati yang berjudul Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan (Studi Kasus BKAD Kabupaten Sleman), yaitu Rata-rata kemandirian Kabupaten Sleman dikategorikan masih kurang karena baru mencapai 35,34%. Namun Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rasio kemandirian yang masih kurang mandiri mengakibatkan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Sleman dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah masih bergantung bantuan pada Pemerintah Pusat.

3. Tingkat efektivitas Pengelolaan PAD

Tingkat Efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidenreng Rappang secara akumulatif dari Tahun 2017-2020 dapat dikategorikan cukup efektif dengan nilai sebesar 84,63% dan pencapaian tertinggi diperoleh pada Tahun 2020 yakni sebesar 92,28%.

Secara umum dapat dilihat bahwa perolehan PAD setiap tahunnya dapat dirata-ratakan mengalami peningkatan namun dari segi efektifitas masih dapat dikategorikan cukup efektif, hal ini dikarenakan pencapaian dari realisasi PAD belum mampu melampaui target yang ditetapkan, permasalahan utama dari kondisi tersebut dikarenakan pada sumber PAD tertinggi dari sektor Pertanian mengalami penurunan selama 4 (Empat) Tahun terakhir dari Tahun 2017-2020.

Berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya penurunan dari sektor tersebut, diantaranya adalah menurunnya hasil panen dari para petani dan juga semakin menurunnya luas lahan yang dikelola petani. Menyikapi hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan berbagai langkah mengantisipasi adanya penurunan disektor pertanian dengan mengoptimalkan peran semua pihak khususnya instansi terkait.

Upaya lain yang juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah yakni dengan berusaha menggali sumber-sumber lain seperti Usaha Kuliner dan Pariwisata yang dianggap memiliki potensi besar dalam memberikan sumbangsi untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai objek wisata dan semakin bertambahnya UMKM yang bergerak dibidang kuliner.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang tergolong masih kurang Efisien karena rata-rata rasionya 99,61% diakibatkan karena total belanja daerahnya masih lebih besar dari pada pendapatan daerahnya. Meskipun Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sudah dapat menekan belanjanya dari pada yang dianggarkan sebelumnya namun jumlah pendapatan yang diperolehnya masih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan belanja daerahnya. Sehingga dapat dikatakan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya.

Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat meminimalisirkan jumlah belanja dengan disesuaikan pendapatannya, sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

Hasil ini sama yang dijelaskan pada penelitian Husnaeni Husaian (2020) bahwa tingkat rasio Efisiensi dikategorikan kurang efisien karena tingkat realisasi pendapatan lebih tinggi dibandingkan biaya pemerolehan PAD. Hal ini terjadi kerena pendapatan asli desa yang diterima oleh Desa Baroko lebih besar dari pada biaya yang diperoleh untuk mendapatkan pendapatan asli desa maka keuangan desa kurang efisien. Apabila pendapatan asli desa yang diterima oleh desa lebih kecil dari pada biaya yang diperoleh untuk mendapatkan pendapatan asli desa maka keuangan desa sangat efisien.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil perhitungan Analisis Rasio yang dilakukan dalam mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis yang diperoleh setelah melakukan perhitungan untuk Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sejak 2017-2020 memberikan gambaran bahwa tingkat kemampuan pemerintah daerah dapat dirata-ratakan berada di kriteria kurangnya derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Sehingga perlu lebih ditingkatkan untuk realisasi pencapaiannya, karena semakin besar nilai PAD maka tingkat Derajat Desentralisasi Fikal akan semakin besar.
2. Analisis Tingkat Kemandirian dan Tingkat Ketergantungan Daerah terhadap Bantuan Pemerintah Pusat menunjukkan bahwa Kemandirian Daerah masih sangat rendah sehingga hal tersebut juga mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan keuangan pemerintah pusat juga masih tergolong tinggi.
3. Analisis Rasio Efektivitas Secara umum dapat dilihat bahwa perolehan PAD setiap tahunnya dapat dirata-ratakan mengalami peningkatan namun dari segi efektifitas masih dapat dikategorikan cukup efektif, hal ini dikarenakan pencapaian dari realisasi PAD belum mampu melampaui target yang ditetapkan, permasalahan utama dari kondisi tersebut dikarenakan pada sumber PAD tertinggi dari sektor Pertanian mengalami penurunan selama 4 (Empat) Tahun terakhir dari Tahun 2015-2020.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang harus tetap meningkatkan penerimaan daerahnya terutama penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dan diharapkan agar berupaya untuk menggali lagi potensi-potensi sumber pendapatan yang belum dimanfaatkan secara optimal agar dapat mengurangi ketergantungannya dari bantuan pemerintah pusat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan melakukan optimalisasi terhadap belanja daerah yang diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang secara langsng berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN; 2011.

[2] Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset; 2002.

[3] Halim A. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat; 2007.

[4] Supartoyo. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers; 2014.

[5] Ariani F. Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Daerah*. 2019;5(2):45-53.

[6] Fadillah R. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan APBD. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. 2021;12(1):22-31.

[7] Rahmadani S, Wibowo T. Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Keuangan Daerah. *Jurnal Keuangan dan Administrasi Negara*. 2022;6(3):112-120.

[8] Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN; 2016.

[9] Aini, H., Kenamon, M., & Anggraini, Y. (2020). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Oku Periode 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *11*(1), 18. https://doi.org/10.36448/jak.v11i1.1393

[10] Arodhiskara, Y., Mas'ud, M., Su'un, M., & Mursalim, M. (2021). The influence of Tudang Sipulung, public accountability, and transparency to the regional budget performance of the municipality of Parepare. *Management Science Letters*, *11*, 49–56. https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.8.031

[11] Harun, H. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, *3*(1), 34-40.